

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perdebatan tentang pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas kebijakan pemerintah. Hal ini jelas memberikan pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun daerah. Beragam kebijakan makro ekonomi yang dapat digunakan pemerintah dalam merespon dan mewujudkan stabilitas perekonomian dan pembangunan. Sejak awal konsep Keynesian menjelaskan bahwa kebutuhan pengeluaran pemerintah merupakan ruang intervensi secara makroekonomi yang dapat dilakukan dalam mempengaruhi output di samping kebijakan lain yang dapat dilakukan dalam perekonomian (Belliveau, 2011).

Proses pembangunan ekonomi suatu negara maupun daerah memiliki beragam aspek yang harus dipertimbangkan. Salah satu aspek tersebut adalah efektifitas kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. Tujuan utama penetapan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah untuk melakukan stimulasi perekonomian agar pemerintah dapat mendorong efektifitas dan efisiensi dari output perekonomian. Dalam beberapa catatan, mekanisme kebijakan fiskal daerah juga berfungsi untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan barang publik oleh masyarakat dimana hal ini lebih dikenal dengan eksternalitas negatif dalam perekonomian. Kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah juga memberikan dampak terhadap aspek-aspek non ekonomi. Untuk mengatasi beragam permasalahan yang dihadapi pemerintah maka perlu sebuah intervensi ekonomi

melalui mekanisme fiskal yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia dengan cakupan luas wilayah dan jumlah penduduk membutuhkan pola pembangunan ekonomi yang relevan. Corak pembangunan ekonomi yang dibutuhkan harus mampu merespon beragam karakteristik daerah. Faktor lokasi suatu wilayah di Indonesia terlihat juga memberikan variasi terhadap kualitas pembangunan ekonomi yang diberikan.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam dua dekade terakhir memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan kualitas dan kuantitas pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Alasan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat terutama di masing-masing daerah. Sehingga beragam kebutuhan pembangunan daerah dalam hal penyediaan layanan publik masyarakat dapat disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang telah disediakan.

Pemerintah memberikan ruang yang cukup luas kepada pemerintah daerah secara mandiri dalam melaksanakan dan melakukan pembiayaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang relevan untuk memajukan perekonomian. Instrumen kebijakan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah adalah pemanfaatan kebijakan fiskal melalui mekanisme pengelolaan dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terjadinya permintaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki daerah yang diamanahkan dalam undang-undang.

Pemerintah daerah memerlukan sebuah kemandirian dalam melakukan pengelolaan fiskal sehingga memunculkan kinerja keuangan daerah yang berkualitas tinggi baik secara ekonomi dan aspek-aspek keuangan publik lainnya. Salah satu prinsip yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah “value for money” yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntabilitas, partisipatif, keadilan, dan transparansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di masa datang (Adi, 2005).

Ukuran yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan kesuksesan dari kebijakan desentralisasi ekonomi di suatu daerah adalah terjadinya peningkatan terhadap pendapatan output daerah (PDRB). Mekanisme otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga sumber daya ekonomi yang dialokasikan dapat dioptimalkan dengan pertanggungjawaban diberikan langsung kepada masyarakat di daerah bersangkutan (Nur'aeni & Suratno, 2015).

Secara makroekonomi, output ekonomi dapat dianalisis salah satunya dari sisi pengeluaran yang ditentukan oleh faktor konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor-import (Net-EM) yang terjadi pada suatu negara maupun daerah. Faktor fiskal daerah merupakan bagian yang menjelaskan output perekonomian dari sisi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat dijadikan instrumen dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan daerah.

Output ekonomi yang digambarkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang lazim dimanfaatkan dalam menjelaskan

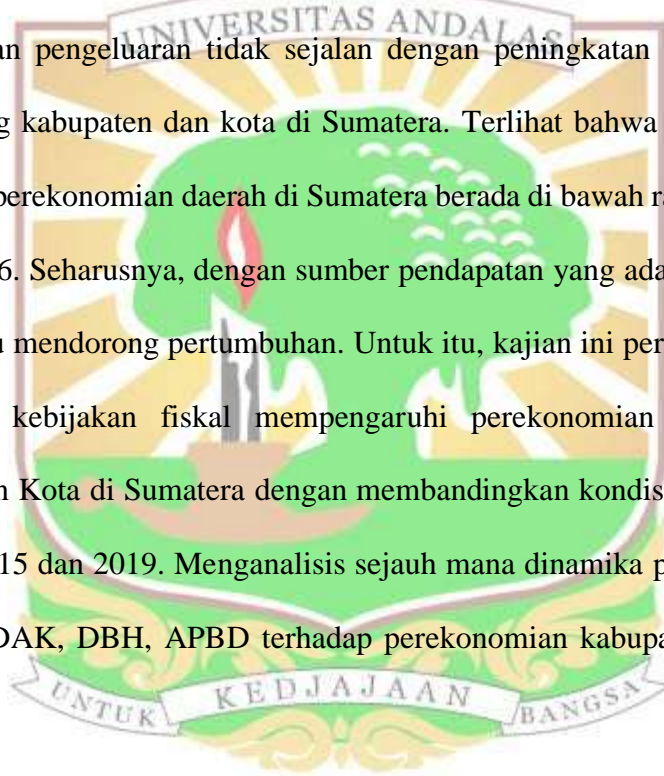
keberhasilan pembangunan. Kehadiran PDRB sebagai ukuran kemajuan ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi dalam masyarakat terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan ini diperkirakan memberikan efek trickle down dalam mendorong kesejahteraan. Artinya PDRB dapat dijadikan sebagai capaian keberhasilan pembangunan.

Secara empiris, kajian yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih bersifat parsial untuk satu kawasan provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia (Pujiati, 2208); Waluyo (2008); Sasana (2005). Perbedaan mendasar dari kajian tersebut di atas lebih menekankan kepada aspek strategi estimasi empiris dari masing-masing data yang digunakan. Namun dalam skala antar negara (Zhang & Zhou, 1998) telah menjelaskan keterkaitan desentralisasi fiskal, pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi yang menemukan bahwa variabel desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di China.

Setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang beragam dalam melaksanakan fungsi otonomi yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari potensi penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa keberhasilan perekonomian suatu daerah tidak tergantung dari besar sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah. Tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk mendekatkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

## 1.2 Perumusan Masalah

Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk transfer kewenangan dari pusat ke daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera memiliki variasi dalam kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dimiliki. Selama periode 2015-2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah memiliki kecenderungan nilai yang positif. Permasalahannya yang terjadi adalah peningkatan sumber pendapatan dan pengeluaran tidak sejalan dengan peningkatan pertumbuhan di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera. Terlihat bahwa secara rata-rata, pertumbuhan perekonomian daerah di Sumatera berada di bawah rata-rata nasional dari 2012-2016. Seharusnya, dengan sumber pendapatan yang ada masing-masing daerah mampu mendorong pertumbuhan. Untuk itu, kajian ini perlu membuktikan sejauh mana kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian masing-masing Kabupaten dan Kota di Sumatera dengan membandingkan kondisi secara dinamis pada tahun 2015 dan 2019. Menganalisis sejauh mana dinamika pengaruh PDRB, PAD, DAU, DAK, DBH, APBD terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Sumatera.



## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sejauh mana dinamika pengaruh PDRB terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Sumatera.
2. Menganalisis sejauh mana pengaruh PAD terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Sumatera.
3. Menganalisis dinamika pengaruh DAU terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Sumatera.

4. Menganalisis sejauh mana pengaruh DAK terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Sumatera.
5. Menganalisis sejauh mana pengaruh DBH terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Sumatera.
6. Menganalisis dinamika pengaruh APBD terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Sumatera.
7. Menganalisis sejauh mana pengaruh faktor sosio-demografi terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Sumatera.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup kajian ini adalah menganalisis kebijakan fiskal dan perekonomian masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera. Ruang lingkup kajian ditujukan untuk regional Sumatera mengingat proporsi nilai output nasional terbesar kedua berada di pulau Sumatera dengan nilai 21,36% (2020). Hal ini menggambarkan seperlima dari perekonomian nasional berada di pulau Sumatera. Selanjutnya lingkup kajian ini juga melihat dinamika antara waktu dari kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian di Sumatera dengan membandingkan waktu 2015 dan 2019. Hal ini bertujuan untuk menganalisis pada satu periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di masing-masing wilayah di Sumatera. Agar penelitian ini menjadi sistematis dan terarah, maka penulis akan mengkaji.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Kajian ini pada bagian awal memulai dengan Pendahuluan yang berisikan tentang motivasi penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan

kajian. Bagian kedua, kajian ini menjelaskan tentang tinjauan literature yang terdiri dari tinjauan literature secara teori. Kemudian bagian ini juga menjelaskan studi-studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bagian metodologi. Kajian ini menjelaskan data dan sumber data yang digunakan, strategi estimasi dan model analisis dan defenisi variabel penelitian yang digunakan.

Bagian hasil dan pembahasan menjelaskan tentang deskripsi dari objek penelitian yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan perekonomian daerah di Sumatera. Selanjutnya bagian ini menjelaskan temuan hasil regresi dalam bentuk analisis panel dengan menggunakan dua titik waktu 2015 dan 2019. Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, kajian ini merekomendasikan berbagai kebijakan yang relevan dalam meningkatkan perekonomian daerah dalam konteks desentralisasi fiskal antar wilayah di Sumatera.

Bagian penutup dalam kajian ini memberikan kesimpulan dari berbagai temuan yang di dapat dan melakukan rekonmendasi kebijakan yang dibutuhkan oleh daerah di tingkat kabupaten dan kota di Pulau Sumatera. Bagian ini juga menjelaskan berbagai keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini untuk jadi perhatian bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.